



SALINAN

# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	127.663.390.963,28	
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.252.299.914.145,00	
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	319.581.072.696,93	(+)
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	1.699.544.377.805,21	

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung			
a) Belanja Pegawai	Rp.	606.234.979.216,00	
b) Belanja Bunga	Rp.	1.151.609.178,50	
c) Belanja Subsidi	Rp.	-	



d)	Belanja Hibah	Rp.	24.454.200.000,00	
e)	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	4.289.200.000,00	
f)	Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.131.858.232,00	
g)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	263.842.568.901,82	
h)	Belanja Terduga Tidak	Rp.	801.474.379,00	(+)
		Rp.	902.905.889.907,32	
2.	Belanja Langsung			
a)	Belanja Pegawai	Rp.	63.778.719.375,00	
b)	Belanja Barang Jasa	Rp.	447.881.639.858,99	
c)	Belanja Modal	Rp.	286.654.817.075,64	(+)
		Rp.	798.315.176.309,63	
	JUMLAH BELANJA	Rp.	1.701.221.066.216,95	
	SURPLUS (DEFISIT)	/ Rp.	(1.676.688.411,74)	
c.	Pembiayaan			
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	123.357.268.208,34	
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	77.460.000.000,00	(-)
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	45.897.268.208,34	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp.	44.220.579.796,60	

#### Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diudangkan di Sambas  
pada tanggal 29 Agustus 2019

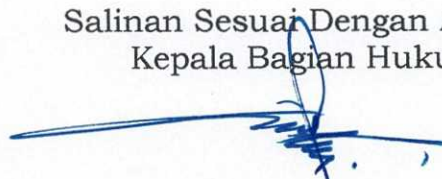
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



MARJUNI, SH

Pembina TK. I (VI/b)

Nip. 19680612 199710 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**

**RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

KD REK	URAIAN	PEMKAB		LEBIH / (KURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,707,102,585,104.56</b>	<b>1,699,544,377,805.21</b>	<b>7,558,207,299.35</b>	<b>99.56</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>208,453,882,650.56</b>	<b>127,663,390,963.28</b>	<b>80,790,491,687.28</b>	<b>61.24</b>
4.1.1.	PAJAK DAERAH	30,091,249,207.00	29,750,525,984.98	340,723,222.02	98.87
4.1.1.01.	Pajak Hotel	462,350,500.00	538,871,200.00	-76,520,700.00	116.55
4.1.1.02.	Pajak Restoran	2,143,650,380.00	3,072,331,304.98	-928,680,924.98	143.32
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	65,500,000.00	103,939,750.00	-38,439,750.00	158.69
4.1.1.04.	Pajak Reklame	479,200,500.00	500,842,358.75	-21,641,858.75	104.52
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	12,019,530,827.00	12,105,121,496.00	-85,590,669.00	100.71
4.1.1.06.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	650,697,000.00	856,081,775.52	-205,384,775.52	131.56
4.1.1.07.	Pajak Parkir	103,320,000.00	127,483,000.00	-24,163,000.00	123.39
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	17,000,000.00	13,520,000.00	3,480,000.00	79.53
4.1.1.10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,650,000,000.00	9,426,105,588.73	1,223,894,411.27	88.51
4.1.1.11.	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	3,500,000,000.00	3,006,229,511.00	493,770,489.00	85.89
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	3,910,208,000.00	3,528,145,802.99	382,062,197.01	90.23
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	2,013,208,000.00	1,926,420,000.00	86,788,000.00	95.69
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	357,000,000.00	421,847,388.00	-64,847,388.00	118.16
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1,540,000,000.00	1,179,878,414.99	360,121,585.01	76.62
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3,683,872,859.00	3,396,765,325.00	287,107,534.00	92.21
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3,683,872,859.00	3,396,765,325.00	287,107,534.00	92.21
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	170,768,552,584.56	90,987,953,850.31	79,780,598,734.25	53.28
4.1.4.02.	Jasa Giro	6,988,311,612.31	2,321,346,557.93	4,666,965,054.38	33.22
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	15,000,000.00	15,300,000.00	-300,000.00	102.00
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	0.00	466,998,150.00	-466,998,150.00	0.00
4.1.4.13.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	582,123,486.00	0.00	582,123,486.00	0.00
4.1.4.14.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	163,183,117,486.25	88,184,309,142.38	74,998,808,343.87	54.04
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,261,783,944,000.00</b>	<b>1,252,299,914,145.00</b>	<b>9,484,029,855.00</b>	<b>99.25</b>
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/HASIL BUKAN PAJAK	28,073,858,000.00	33,567,662,883.00	-5,493,804,883.00	119.57
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	23,735,245,000.00	29,288,701,018.00	-5,553,456,018.00	123.40
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4,338,613,000.00	4,278,961,865.00	59,651,135.00	98.63
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	873,609,250,000.00	873,609,250,000.00	0.00	100.00
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	873,609,250,000.00	873,609,250,000.00	0.00	100.00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	360,100,836,000.00	345,123,001,262.00	14,977,834,738.00	95.84
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus	177,104,684,000.00	165,895,285,355.00	11,209,398,645.00	93.67
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	182,996,152,000.00	179,227,715,907.00	3,768,436,093.00	97.94
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>236,864,758,454.00</b>	<b>319,581,072,696.93</b>	<b>-82,716,314,242.93</b>	<b>134.92</b>
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	1,963,892,000.00	77,910,285,456.93	-75,946,393,456.93	3.967,14
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	1,963,892,000.00	77,910,285,456.93	-75,946,393,456.93	3.967,14
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	62,056,628,454.00	68,826,549,240.00	-6,769,920,786.00	110.91
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	62,056,628,454.00	68,826,549,240.00	-6,769,920,786.00	110.91
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	172,844,238,000.00	172,844,238,000.00	0.00	100.00
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	172,844,238,000.00	172,844,238,000.00	0.00	100.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,707,102,585,104.56</b>	<b>1,699,544,377,805.21</b>	<b>7,558,207,299.35</b>	<b>99.56</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,752,999,853,325.50</b>	<b>1,701,221,066,216.95</b>	<b>51,778,787,108.55</b>	<b>97.05</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>923,629,370,514.46</b>	<b>902,905,889,907.32</b>	<b>20,723,480,607.14</b>	<b>97.76</b>
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	624,370,592,132.76	606,234,979,216.00	18,135,612,916.76	97.10
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	576,497,055,999.76	560,337,576,943.00	16,159,479,056.76	97.20
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	33,809,651,591.00	32,105,695,000.00	1,703,956,591.00	94.96
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	12,897,959,323.00	12,802,600,000.00	95,359,323.00	99.26



KD REK	URAIAN	PEMKAB		LEBIH / (KURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	940,085,919.00	911,570,223.00	28,515,696.00	96.97
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	225,839,300.00	77,537,050.00	148,302,250.00	34.33
5.1.2.	BELANJA BUNGA	1,151,609,178.50	1,151,609,178.50	0.00	100.00
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	1,151,609,178.50	1,151,609,178.50	0.00	100.00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	25,890,200,000.00	24,454,200,000.00	1,436,000,000.00	94.45
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	19,619,000,000.00	18,219,000,000.00	1,400,000,000.00	92.86
5.1.4.12.	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	6,271,200,000.00	6,235,200,000.00	36,000,000.00	99.43
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	4,566,000,000.00	4,289,200,000.00	276,800,000.00	93.94
5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat	4,566,000,000.00	4,289,200,000.00	276,800,000.00	93.94
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	2,638,420,403.20	2,131,858,232.00	506,562,171.20	80.80
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2,638,420,403.20	2,131,858,232.00	506,562,171.20	80.80
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	264,012,548,800.00	263,842,568,901.82	169,979,898.18	99.94
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	263,012,548,800.00	263,012,548,800.00	0.00	100.00
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1,000,000,000.00	830,020,101.82	169,979,898.18	83.00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,000,000,000.00	801,474,379.00	198,525,621.00	80.15
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	1,000,000,000.00	801,474,379.00	198,525,621.00	80.15
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>829,370,482,811.04</b>	<b>798,315,176,309.63</b>	<b>31,055,306,501.41</b>	<b>96.26</b>
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63,214,613,337.51	63,778,719,375.00	-564,106,037.49	100.89
5.2.1.01.	Honorarium PNS	12,486,315,000.00	11,994,741,250.00	491,573,750.00	96.06
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36,706,527,402.84	35,890,823,099.00	815,704,303.84	97.78
5.2.1.06.	Belanja Pegawai Pada BLUD	3,144,466,880.00	2,880,950,094.00	263,516,786.00	91.62
5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	10,877,304,054.67	13,012,204,932.00	-2,134,900,877.33	119.63
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	469,415,911,524.48	447,881,639,858.99	21,534,271,665.49	95.41
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis	23,482,515,483.64	21,575,671,235.00	1,906,844,248.64	91.88
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2,786,156,961.00	2,740,353,108.00	45,803,853.00	98.36
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46,388,380,321.72	39,589,970,905.91	6,798,409,415.81	85.34
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6,407,500,000.00	6,093,022,245.00	314,477,755.00	95.09
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,151,353,766.00	5,878,728,369.00	272,625,397.00	95.57
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,953,639,866.00	10,514,495,187.00	439,144,679.00	95.99
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,683,270,500.00	1,625,270,000.00	58,000,500.00	96.55
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	573,786,000.00	487,901,000.00	85,885,000.00	85.03
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	451,755,000.00	410,083,178.00	41,671,822.00	90.78
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20,998,442,500.00	20,014,995,243.00	983,447,257.00	95.32
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	780,964,860.00	776,754,360.00	4,210,500.00	99.46
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	263,338,200.00	262,385,200.00	953,000.00	99.64
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	978,411,650.00	962,924,150.00	15,487,500.00	98.42
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77,422,949,251.97	75,690,423,161.00	1,732,526,090.97	97.76
5.2.2.16.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	49,148,957,733.34	48,687,021,161.00	461,936,572.34	99.06
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	9,641,317,253.63	9,197,837,000.00	443,480,253.63	95.40
5.2.2.20.	Belanja Barang Dana BOS	49,726,356,051.84	46,488,708,145.46	3,237,647,906.38	93.49
5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	54,976,165,021.05	50,898,711,780.00	4,077,453,241.05	92.58
5.2.2.23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	970,815,000.00	956,065,000.00	14,750,000.00	98.48
5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7,706,674,194.96	7,513,290,315.50	193,383,879.46	97.49
5.2.2.25.	Belanja Barang dan jasa pada BLUD	80,401,583,677.33	80,686,276,055.12	-284,692,377.79	100.35
5.2.2.26.	Belanja Jasa PNS/ Non PNSD	8,619,105,282.00	8,077,294,000.00	541,811,282.00	93.71
5.2.2.27.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8,692,472,950.00	8,543,459,060.00	149,013,890.00	98.29
5.2.2.28.	Belanja Kebijakan Intervensi Harga	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	100.00
5.2.3.	BELANJA MODAL	296,739,957,949.05	286,654,817,075.64	10,085,140,873.41	96.60
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	8,798,791,000.00	6,650,037,540.00	2,148,753,460.00	75.58
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1,904,102,000.00	1,868,999,800.00	35,102,200.00	98.16
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4,549,710,000.00	3,942,791,775.00	606,918,225.00	86.66
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	15,000,000.00	14,980,000.00	20,000.00	99.87
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	8,995,000.00	8,867,500.00	127,500.00	98.58
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	418,844,000.00	415,203,000.00	3,641,000.00	99.13
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,378,710,958.00	1,217,348,618.00	161,362,340.00	88.30
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor/RT	1,990,981,391.00	1,931,501,900.00	59,479,491.00	97.01
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,652,193,192.00	2,596,281,568.00	55,911,624.00	97.89
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1,657,034,991.00	1,618,720,230.00	38,314,761.00	97.69
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	33,102,500.00	31,885,250.00	1,217,250.00	96.32
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	74,370,000.00	73,100,000.00	1,270,000.00	98.29



KD REK	URAIAN	PEMKAB		LEBIH / (KURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	365,209,353.00	355,281,503.00	9,927,850.00	97,28
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	196,640,000.00	196,310,000.00	330,000.00	99,83
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	95,000,000.00	84,680,000.00	10,320,000.00	89,14
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	24,009,391,660.00	23,162,311,604.00	847,080,056.00	96,47
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1,631,746,000.00	1,330,437,750.00	301,308,250.00	81,53
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	95,704,271,000.00	94,688,236,268.00	1,016,034,732.00	98,94
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	15,865,430,632.56	15,642,760,456.00	222,670,176.56	98,60
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	13,520,350,000.00	13,091,121,717.00	429,228,283.00	96,83
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	737,790,000.00	735,271,000.00	2,519,000.00	99,66
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	14,256,720,000.00	14,145,855,165.00	110,864,835.00	99,22
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	80,796,850,718.00	78,882,476,753.00	1,914,373,965.00	97,63
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	710,775,000.00	708,599,990.00	2,175,010.00	99,69
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	410,000,000.00	410,000,000.00	0.00	100,00
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	61,000,000.00	60,850,000.00	150,000.00	99,75
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1,699,644,400.00	1,525,731,275.00	173,913,125.00	89,77
5.2.3.33.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	240,000,000.00	239,492,800.00	507,200.00	99,79
5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	21,120,000.00	21,120,000.00	0.00	100,00
5.2.3.35.	Belanja Modal Pada BLUD	4,787,274,260.00	5,295,521,451.00	-508,247,191.00	110,62
5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kode Batang ( Barcode)	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0,00
5.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perlengkapan Asrama Mahasiswa	221,770,000.00	211,270,000.00	10,500,000.00	95,27
5.2.3.39.	Belanja Modal Pengadaan Aplikasi	450,000,000.00	375,935,000.00	74,065,000.00	83,54
5.2.3.40.	BELANJA MODAL DANA BOS	17,419,139,893.49	15,121,837,162.64	2,297,302,730.85	86,81
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,752,999,853,325.50</b>	<b>1,701,221,066,216.95</b>	<b>51,778,787,108.55</b>	<b>97,05</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(45,897,268,220.94)</b>	<b>(1,676,688,411.74)</b>	<b>44,220,579,809.20</b>	<b>3,65</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>45,897,268,220.94</b>	<b>45,897,268,208.34</b>	<b>12.60</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>123,357,268,220.94</b>	<b>123,357,268,208.34</b>	<b>12.60</b>	<b>100,00</b>
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	28,357,268,220.94	28,357,268,208.34	12.60	100,00
6.1.1.07.	Penerimaan Pembiayaan	28,357,268,220.94	28,357,268,208.34	12.60	100,00
6.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00	0.00	100,00
6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	95,000,000,000.00	95,000,000,000.00	0.00	100,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>123,357,268,220.94</b>	<b>123,357,268,208.34</b>	<b>12.60</b>	<b>100,00</b>
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>77,460,000,000.00</b>	<b>77,460,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,00</b>
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	100,00
6.2.2.01.	PENYERTAAN MODAL DAERAH	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	100,00
6.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	74,960,000,000.00	74,960,000,000.00	0.00	100,00
6.2.3.07.	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	74,960,000,000.00	74,960,000,000.00	0.00	100,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>77,460,000,000.00</b>	<b>77,460,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>45,897,268,220.94</b>	<b>45,897,268,208.34</b>	<b>12.60</b>	<b>100,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>44,220,579,796.60</b>	<b>-44,220,579,796.60</b>	<b>0,00</b>

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



MARJUNI, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001